

BONUS DEMOGRAFI DAN TANTANGAN REKONSTRUKSI DEMOKRASI INDONESIA: PERAN STRATEGIS GENERASI MUDA

Yosef Valdo Leso

valdolesoyosef@gmail.com

IFTK Ledalero

ABSTRAK

Fenomena bonus demografi yang tengah berlangsung di Indonesia menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan serius bagi masa depan demokrasi. Proporsi penduduk usia produktif yang dominan seharusnya menjadi modal sosial untuk memperkuat kehidupan politik yang partisipatif dan berkeadilan. Namun, rendahnya kesadaran politik dan lemahnya literasi digital di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) untuk menganalisis keterkaitan antara bonus demografi dan rekonstruksi demokrasi di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada peran generasi muda dalam memperkuat partisipasi politik, membangun etika publik, serta memanfaatkan media digital sebagai ruang demokrasi baru. Hasil analisis menunjukkan bahwa bonus demografi dapat menjadi kekuatan moral dan sosial bagi demokrasi substantif apabila diiringi pendidikan politik, literasi digital yang kritis, dan kepemimpinan etis yang berpihak pada rakyat. Sebaliknya, tanpa reformasi nilai dan kesadaran publik, bonus demografi justru berisiko memperkuat oligarki dan apatisme politik. Oleh karena itu, rekonstruksi demokrasi perlu diarahkan pada pembentukan generasi muda yang kritis, beretika, dan berkomitmen terhadap keadilan sosial sebagai fondasi bagi masa depan demokrasi Indonesia yang inklusif.

Kata Kunci: Bonus Demografi; Demokrasi Indonesia; Generasi Muda; Literasi Digital.

PENDAHULUAN

Salah satu fenomena penting yang mewarnai transformasi sosial-politik global pada abad ke-21 adalah menguatnya tuntutan terhadap demokrasi, khususnya di negara-negara berkembang. Demokrasi diyakini mampu menjamin keteraturan publik sekaligus menjadi instrumen transformasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya menuju tatanan kehidupan yang lebih manusiawi, egaliter, dan berkeadilan.¹ Dalam konteks globalisasi yang ditandai oleh keterbukaan informasi, demokrasi menjadi simbol tata pemerintahan modern yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama dalam proses pengambilan keputusan politik. Demokrasi tidak hanya dipandang sebagai mekanisme politik untuk menentukan pemimpin, tetapi juga sebagai sistem etis yang menuntut partisipasi aktif warga negara dalam mengarahkan kehidupan bersama secara bertanggung jawab.

Indonesia sebagai negara berdaulat dan multikultural menjadikan demokrasi sebagai dasar sistem politik sejak era reformasi. Harapan besar disematkan pada sistem ini agar mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kedaulatan rakyat diwujudkan melalui keterlibatan mereka dalam seluruh proses politik dan pemerintahan, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, hingga pengawasan, sehingga tercipta pemerintahan yang benar-benar berasal dari, oleh, dan untuk rakyat.² Dalam khazanah politik kontemporer, nilai-nilai seperti kesetaraan, keragaman, penghormatan atas hak-hak asasi, dan tanggung jawab bersama telah menjadi dasar substansial dalam demokrasi. Dapat dikatakan, setiap kemauan politik hanya dapat

¹MasdarUmaridin, *Membaca pikiran Gusdur dan Amin rais tentang Demokrasi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 1999. Hlm. 1-2

²Prof. Dr. Sunny Umul Firdaus, S.H., M.H, dkk. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Kajian Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia*, hlm. 8

terwujud dengan baik apabila dilandaskan atau digerakkan oleh kemauan bersama yang baik dari semua warga negara.³ Memang demokrasi bukanlah bentuk politik satu-satunya, tetapi karena belum ada bentuk politik lain yang lebih baik daripadanya, maka demokrasi tetap dipandang sebagai akses yang lebih layak dalam mencapai nilai-nilai seperti kesetaraan, keragaman, penghormatan atas hak-hak asasi, dan tanggung jawab bersama.⁴

Demokrasi sejatinya bukan sekadar sistem politik yang berdiri di atas prosedur elektoral, melainkan suatu proses moral dan sosial yang menuntut kesadaran bersama akan tanggung jawab publik. Ia tidak boleh dipahami hanya sebagai ajang perebutan kekuasaan yang dibungkus dengan legitimasi suara mayoritas, melainkan sebagai ruang di mana seluruh warga negara mengarahkan kehendak bersama demi kebaikan bersama. Dalam demokrasi, yang menjadi inti bukan sekadar siapa yang berkuasa, tetapi bagaimana kekuasaan dijalankan dengan etika, keadilan, dan kesadaran kemanusiaan. Demokrasi yang sesungguhnya hanya dapat tumbuh apabila didukung oleh warga negara yang berkarakter baik dan berjiwa etis.

Keberlangsungan demokrasi tidak semata-mata ditopang oleh sistem hukum dan lembaga yang menegakkannya, tetapi juga oleh sikap demokratis yang berlandaskan kesadaran moral, terutama dalam mengekspresikan pendapat di ruang publik.⁵ Nilai kesetaraan, tanggung jawab sosial, dan kejujuran politik merupakan roh yang menjaga kehidupan demokrasi agar tetap bernyawa. Ketika nilai-nilai ini terabaikan dan digantikan oleh kepentingan pribadi atau kelompok, demokrasi kehilangan arah dan berubah menjadi sekadar ritual politik yang kosong dari makna sosial. Demokrasi menuntut keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, antara hak individu dan kepentingan bersama *bonum commune*.

Namun dalam perjalannya, demokrasi Indonesia kerap menghadapi krisis dalam berbagai dimensi. Krisis tersebut meliputi krisis hakikat demokrasi, krisis kepemimpinan, krisis kesejahteraan, dan krisis konsistensi hukum. Keempat krisis tersebut memperlihatkan bahwa demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya berakar kuat dalam kesadaran moral warga negara. Demokrasi masih sering dipahami sebatas prosedur elektoral, bukan sebagai budaya politik yang hidup dalam praktik sosial sehari-hari. Krisis hakikat demokrasi tampak ketika nilai-nilai demokrasi direduksi menjadi sekadar kontestasi elektoral. Demokrasi kehilangan makna etisnya dan berubah menjadi arena perebutan kekuasaan yang diwarnai pragmatisme politik. Sementara itu, krisis kepemimpinan muncul karena orientasi elite politik cenderung berpusat pada kepentingan kelompok, bukan kepentingan rakyat secara luas. Krisis kesejahteraan pun masih terasa karena demokrasi belum sepenuhnya menghasilkan pemerataan ekonomi dan keadilan sosial. Sedangkan krisis konsistensi hukum tampak dalam lemahnya penegakan hukum serta praktik korupsi yang merusak kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Semua ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia belum mampu menjadi ruang moral yang menumbuhkan tanggung jawab publik dan solidaritas sosial.

oportunistik, demokrasi kehilangan jiwanya. Ia berubah menjadi ritual kekuasaan yang menampilkan wajah demokratis secara formal, namun kosong secara substansial. Karena itu, rekonstruksi demokrasi Indonesia harus berangkat dari upaya membangun kembali fondasi moral dan etika publik warga negara. Kondisi krisis demokrasi ini

³Felix Baghi (ed.), *Kewarganegaraan Demokratis: Dalam Sorotan Filsafat Politik* (Maumere: Ledalero, 2009), Hlm. x.

⁴Ibid., hlm. Xiii.

⁵N. Ulfah, Y. Hidayah, dan M. Trihastuti, "Urgensi Etika Demokrasi di Era Global: Membangun Etika dalam Mengemukakan Pendapat bagi Masyarakat Akademis melalui Pendidikan Kewarganegaraan," *Jurnal Kewarganegaraan*, vol. 5, no. 2 (Desember 2021): 345.

membuka ruang bagi refleksi baru: apakah sistem yang diidealkan rakyat masih memberi tempat bagi mereka untuk menjadi pelaku utama? Indonesia sedang berada dalam proses mencari bentuk demokrasi yang sebenarnya.⁶ Pertanyaan ini menjadi semakin penting ketika bangsa Indonesia sedang menghadapi fenomena sosial besar yang menentukan arah masa depannya, yakni “**bonus demografi**”.

Bonus demografi adalah suatu periode ketika jumlah penduduk usia produktif jauh melampaui jumlah penduduk usia nonproduktif.⁷ Fenomena ini merupakan peluang besar bagi kemajuan bangsa jika dikelola secara tepat, karena tenaga produktif yang melimpah dapat menjadi modal sosial dan ekonomi yang signifikan bagi pembangunan nasional.⁸ Bonus demografi adalah momentum untuk memperkuat basis demokrasi melalui partisipasi aktif generasi muda dalam kehidupan politik. Generasi muda sebagai kelompok dominan dalam struktur penduduk produktif berpotensi menjadi motor penggerak demokrasi yang lebih substantif, terbuka, dan partisipatif. Namun kenyataannya, generasi muda sering kali justru terjebak dalam apatisme politik, rendahnya literasi politik, dan keterasingan terhadap isu-isu kebangsaan. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi demografis dan kesiapan moral serta intelektual generasi muda dalam menghadapi tantangan demokrasi kontemporer.

Merubris fenomena dominasi penduduk usia produktif sebagai potensi bonus demografi, menurut Handoko hal yang mesti dilakukan yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui tiga pilar utama:*perntama*, Pendidikan: Meningkatkan mutu dan akses pendidikan untuk membekali generasi muda dengan keterampilan yang relevan.*Kedua*, Kesehatan: Menjamin layanan kesehatan yang mudah diakses guna memastikan tenaga kerja yang sehat dan produktif.*Ketiga*, Ekonomi: Menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai dan mendukung daya saing masyarakat. Handoko menegaskan bahwa ukuran kualitas penduduk dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan pendapatan/ekonomi. Peningkatan ketiga aspek ini akan berkontribusi pada pembangunan nasional yang berkelanjutan.⁹

Ditengah era digital, tantangan demokrasi semakin kompleks. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sistem politik dan praktik demokrasi. Salah satu transformasi penting di era digital adalah munculnya demokrasi digital, yaitu model partisipasi politik yang memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial, portal berita daring, dan forum diskusi virtual untuk melibatkan warga negara secara aktif dalam proses politik.¹⁰ Perkembangan ini memungkinkan individu untuk menyampaikan pendapat, berdiskusi, dan memengaruhi keputusan politik secara lebih langsung, tanpa melalui jalur formal yang kerap dibatasi oleh prosedur birokrasi. Media sosial menjadi ruang baru bagi praktik demokrasi digital di mana opini, ekspresi, dan preferensi politik dib

Namun di sisi lain, ruang digital juga menjadi arena munculnya disinformasi, ujaran

⁶Ibid., hlm. XII

⁷Achmad Nur Sutikno, “Bonus Demografi di Indonesia,” VISIONER: *Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 12(2), 2020, hlm. 426. <https://doi.org/10.54783/jv.v12i2.285>. diakses pada 18 Oktober 2025

⁸Ibid., hlm. 430

⁹L. T. Handoko, “*Maksimalkan Bonus Demografi Melalui Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi*,” Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2022, diakses 18 Oktober 2025, <https://www.brin.go.id/news/109512/>

¹⁰Santika Afionita dan Sinta Nur Rahayu, “Demokrasi Digital dan Pendidikan Politik Generasi Muda di Indonesia,” *Jurnal Kajian Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2025): 143–152, <https://doi.org/10.63082/jksh.v1i3.19>. Diakses pada 18 Oktober 2025.

kebencian, dan polarisasi identitas politik. Disinformasi dapat dengan mudah menyebar ke seluruh platform digital dan memengaruhi pendapat serta keputusan politik banyak orang, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk menilai informasi yang valid dan tidak valid.¹¹ Dalam konteks ini pendidikan politik memegang peran strategis dalam membentuk kesadaran demokrasi generasi muda. Tujuannya adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis, rasional, dan kreatif peserta didik dalam menanggapi isu-isu kewarganegaraan, serta memupuk partisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, pendidikan politik diarahkan untuk membentuk karakter generasi muda yang berintegritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan yang mendorong demokrasi lebih berkeadaban.¹² Pendidikan politik tidak hanya berlangsung melalui jalur formal seperti sekolah atau universitas, tetapi juga melalui jalur nonformal dan informal seperti media sosial, komunitas kreatif, organisasi masyarakat, dan ruang publik digital.

Dengan demikian, fenomena bonus demografi memiliki keterkaitan erat dengan rekonstruksi demokrasi Indonesia. Bonus demografi dapat menjadi peluang besar bagi kemajuan demokrasi apabila generasi muda mampu berperan aktif sebagai subjek politik yang sadar akan tanggung jawab sosialnya. Sebaliknya, tanpa pembinaan moral dan pendidikan politik yang memadai, bonus demografi justru dapat memperburuk kualitas demokrasi melalui apatisme, pragmatisme, dan politik identitas yang dangkal.

Berdasarkan realitas sosial-politik tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam keterkaitan antara bonus demografi dan rekonstruksi demokrasi Indonesia, dengan fokus pada peran generasi muda sebagai aktor utama perubahan sosial-politik. Pembahasan diarahkan untuk memahami bagaimana potensi bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal bagi penguatan demokrasi yang berorientasi pada nilai moral dan etika publik.

Adapun pembahasan dalam tulisan ini difokuskan pada empat bagian utama, yaitu: Bonus Demografi dan Relevansinya bagi Demokrasi Indonesia, dan Bonus Demograf: Tantangan dan Peluang Terhadap Demokrasi. Melalui kajian ini diharapkan muncul pemahaman baru tentang bagaimana demokrasi dapat direkonstruksi secara substansial di tengah peluang dan tantangan yang dihadirkan oleh fenomena bonus demografi, agar demokrasi Indonesia tidak hanya bertahan secara prosedural, tetapi juga tumbuh sebagai kesadaran moral bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak berfokus pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada analisis mendalam terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dengan tema bonus demografi dan demokrasi di Indonesia. Melalui kajian literatur, penulis berupaya memahami, menafsirkan, dan menilai fenomena sosial-politik secara reflektif berdasarkan data yang telah dipublikasikan sebelumnya.

Pendekatan kualitatif memberi ruang bagi penulis untuk memahami makna yang terkandung di balik data dan teks. Dalam hal ini, penulis bertindak sebagai instrumen utama yang menafsirkan gagasan para penulis sebelumnya, menghubungkannya dengan konteks sosial, dan menarik kesimpulan secara kritis. Penelitian ini berangkat dari

¹¹*Ibid.*,

¹² Siti Kholiza Aulia, et.al “Tinjauan Peran Pendidikan Politik Dalam Kehidupan Demokrasi Generasi Z,” *JurnalKewarganegaraan*, 8(2), (Desember 2024), P-ISSN: 1978-0184, E-ISSN: 2723-2328, hlm. 1464

kesadaran bahwa fenomena demokrasi dan partisipasi generasi muda tidak bisa diukur hanya dengan angka, tetapi perlu dipahami melalui pandangan, nilai, dan pengalaman yang terekam dalam berbagai ini tulisan ilmiah.

Metode studi pustaka dipilih karena memungkinkan penulis untuk memanfaatkan sumber ilmiah yang telah ada seperti jurnal akademik, buku, laporan penelitian, dan artikel ilmiah sebagai dasar analisis. Sumber-sumber tersebut memberikan landasan teoretis sekaligus gambaran empiris mengenai peran generasi muda dalam memperkuat demokrasi di tengah peluang bonus demografi. Semua literatur yang digunakan dipilih secara selektif dengan mempertimbangkan kredibilitas, relevansi, dan keterkinian. Penulis menggunakan berapa tahap dalam proses penelitian ini:

pertama, proses pengumpulan sumber pustaka. Penulis menelusuri jurnal ilmiah nasional, buku serta artikel dan sumber lainnya yang relevan dengan judul yg diangkat serta beberapa sumber lain juga diambil dari publikasi universitas serta portal akademik terpercaya. Proses pengumpulan dilakukan secara sistematis dengan mencatat informasi penting, seperti tahun terbit, fokus penelitian, metode yang digunakan, dan kesimpulan utama.

Kedua, Analisis Literatur. Pada tahap ini, penulis melakukan analisis terhadap berbagai sumber literatur melalui pembacaan dan pemahaman yang komprehensif terhadap argumen, gagasan, serta data yang disajikan oleh masing-masing penulis. Analisis dilakukan secara tematik dengan menyoroti isu-isu utama yang relevan, seperti peran generasi muda dalam dinamika demokrasi, tantangan partisipasi politik, dan potensi bonus demografi terhadap masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk menjaga kedalaman dan akurasi, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini menuntun penulis untuk tidak hanya menggambarkan fenomena, tetapi juga mengkaji hubungan sebab-akibat serta relevansi antara teori dan kenyataan. Dengan demikian, hasil penelitian tidak berhenti pada deskripsi data, tetapi menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang persoalan yang diteliti.

Kriteria utama dalam pemilihan sumber adalah:

1. Relevansi terhadap fokus penelitian (bonus demografi dan demokrasi Indonesia).
2. Kredibilitas akademik, yakni sumber berasal dari jurnal ilmiah dan lembaga pendidikan yang diakui.

Hasil akhir dari proses ini adalah sintesis pemikiran yang menggambarkan hubungan antara bonus demografi, partisipasi generasi muda, dan dinamika demokrasi di Indonesia. Melalui metode studi pustaka, penulis mampu menyusun pemahaman yang menyeluruh tanpa harus terjun langsung ke lapangan, karena semua informasi yang dibutuhkan telah terdokumentasi dengan baik dalam berbagai karya ilmiah.

Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya menjadi cara untuk mengumpulkan data, tetapi juga sarana untuk membangun refleksi kritis terhadap kondisi sosial-politik bangsa. Pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka memungkinkan penulis membaca ulang peran generasi muda dalam membangun demokrasi yang partisipatif, inklusif, dan berkeadilan di tengah tantangan globalisasi dan perubahan sosial yang cepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bonus Demografi dan Relevansinya bagi Demokrasi Indonesia

Fenomena bonus demografi di Indonesia merupakan salah satu momentum strategis dalam dinamika pembangunan nasional, terutama dalam konteks penguatan kehidupan demokrasi. Secara demografis, Indonesia saat ini tengah memasuki fase transisi yang ditandai oleh meningkatnya proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) dibandingkan dengan penduduk usia nonproduktif. Fenomena ini mulai tampak sejak tahun 2012 dan

diperkirakan mencapai puncaknya pada periode 2020–2035. Meskipun demikian, fase bonus demografi tidak berlangsung secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Provinsi DKI Jakarta, misalnya, mengalami fase tersebut lebih awal dan diperkirakan berakhir pada tahun 2030, diikuti oleh beberapa provinsi lain seperti Jawa Timur, Banten, DI Yogyakarta, dan Bali.¹³

Dalam Seminar masalah kependudukan di Indonesia yang dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang dipaparkan oleh Surya Chandra, dari anggota DPR Komisi IX, bahwa jumlah usia angkatan kerja (15-64 tahun) pada 2020-2035 akan mencapai 70 persen, sedangkan 30 persen adalah penduduk dengan usia nonproduktif (di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun). Bila dilihat dari jumlahnya, penduduk usia produktif mencapai sekitar 180 juta, sementara penduduk nonproduktif hanya 60 juta.¹⁴ Bonus demografi dapat memberikan sinyal positif apabila dikelola secara tepat, dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial-politik bangsa. Namun, apabila peluang ini tidak dimanfaatkan secara optimal, justru akan berubah menjadi bencana demografis. Tanpa adanya investasi yang memadai dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pembentukan karakter, jumlah penduduk usia produktif yang besar berpotensi menjadi beban (*liability*) dan bukan aset bagi bangsa.¹⁵

Situasi ini menandai bahwasanya Indonesia tengah memasuki fase *masa emas* kependudukan, di mana proporsi penduduk usia produktif menjadi modal utama bagi kemajuan ekonomi, sosial, dan politik bangsa, apabila dikelola secara tepat dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045, diperlukan upaya strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama kemajuan bangsa. Kegagalan dalam meningkatkan mutu manusia Indonesia akan berdampak pada rendahnya daya saing dan kemampuan inovasi di tingkat global. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran sentral dalam mendorong kemajuan sosial, teknologi, dan ekonomi menuju terwujudnya masyarakat yang berdaya saing dan sejahtera.¹⁶

Fenomena ini menjadi peluang strategis bagi Negara Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat pembangunan nasional melalui optimalisasi potensi generasi muda sebagai sumber daya manusia produktif. Relevansi bonus demografi terhadap demokrasi menjadi semakin signifikan ketika generasi muda memiliki literasi politik dan kesadaran sosial yang tinggi. Dalam konteks ini, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai sistem politik yang prosedural, melainkan juga sebagai praktik sosial yang menuntut partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan publik. Generasi muda yang kritis, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan teknologi memiliki peran penting dalam memastikan kualitas demokrasi yang substantif. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Dr. TB Ace Hasan Syadzily, dalam orasi kebangsaan pada peringatan HUT ke-60 Lemhannas RI, menegaskan bahwa “generasi muda Indonesia hari ini adalah bonus demografi sekaligus bonus ketahanan nasional.

¹³ Badan Pusat Statistik (BPS), *Analisis Profil Penduduk Indonesia*, Jakarta: BPS, 2022, hlm.18. <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/06/24/ea52f6a38d3913a5bc557c5f/analisis-profil-penduduk-indonesia.html> (diakses 18 Oktober 2025).

¹⁴*Ibid.*, hlm.422

¹⁵*Ibid.*, hlm. 432

¹⁶Simon Sumanjoyo Hutagalung, et.al “Menuju Indonesia Emas 2045: Peran Generasi Muda Bidang Sosial, Teknologi, dan Ekonomi,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPM) Terekam Jejak* Vol. 1, No. 1 (2024), hlm. 7 diakses melalui <https://jpm.terekamjejak.com/index.php/home/index>. 19 Oktober 2025.

Mereka adalah digital native, kreatif, kritis, dan penuh semangat.”¹⁷

Pernyataan demikian sejalan dengan konsep Ace Hasan menekankan bahwa potensi generasi muda harus diarahkan melalui pendidikan karakter, penguatan literasi digital, penguasaan teknologi kecerdasan buatan, serta penyusunan kebijakan publik yang membuka ruang partisipasi sosial dan inovasi politik.¹⁸ Dua perspektif ini menegaskan bahwa bonus demografi tidak semata-mata berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi ideologis dan kultural yang berpengaruh terhadap ketahanan nasional dan kualitas demokrasi

Dengan demikian, generasi muda tidak sekadar berfungsi sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek aktif dalam proses demokratisasi. Mereka berperan dalam memperkuat sistem nilai, etika publik, dan tanggung jawab sosial yang menjadi prasyarat bagi keberlangsungan demokrasi yang berkeadilan. Namun, realisasi potensi tersebut sangat bergantung pada kualitas pendidikan politik, pembentukan karakter kebangsaan, serta kemampuan negara menyediakan ekosistem sosial yang mendukung aktualisasi potensi generasi muda.

Oleh karena itu, pemanfaatan bonus demografi harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan demokrasi yang berkelanjutan. Negara dituntut untuk mengembangkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pembentukan warga negara yang kritis, partisipatif, dan berintegritas. Dalam perspektif ini, bonus demografi menjadi momentum strategis untuk mengonsolidasikan demokrasi Indonesia ke arah yang lebih substansial, inklusif, dan berkeadilan.

Bonus Demografi: Tantangan dan Peluang Terhadap Demokrasi

Bonus demografi tidak hanya membawa implikasi ekonomi dan sosial, tetapi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan demokrasi suatu bangsa. Meningkatnya jumlah penduduk usia produktif membuka peluang bagi penguatan partisipasi politik, munculnya gagasan-gagasan segar, serta terbentuknya generasi muda yang kritis dan melek politik. Namun, di sisi lain, fenomena ini juga menghadirkan tantangan berupa potensi rendahnya literasi politik, apatisme terhadap proses demokrasi, dan kerentanan terhadap manipulasi informasi di ruang digital. Jika tidak diimbangi dengan pendidikan politik yang memadai dan pembangunan karakter warga negara yang bertanggung jawab, bonus demografi dapat berubah dari peluang menjadi ancaman bagi kualitas demokrasi. Oleh karena itu, pengelolaan bonus demografi harus disertai dengan upaya sistematis untuk meningkatkan kesadaran politik, etika bermedia, dan keterlibatan aktif generasi muda dalam proses demokratisasi yang sehat dan berkeadaban. Berikut adalah penjelasan tentang tantangan dan peluang bonus demografi terhadap demokrasi.

Tantangan Bonus Demografi Terhadap Demokrasi

Tantangan bonus demografi terhadap demokrasi di Indonesia bersifat kompleks dan berlapis, terutama karena dominasi penduduk usia produktif dalam struktur demografi nasional. Meskipun pada dasarnya merupakan peluang besar bagi kemajuan bangsa, bonus demografi juga menyimpan risiko yang dapat mengancam stabilitas demokrasi apabila tidak dikelola dengan baik. Indonesia adalah negara yang di tengah bonus demografi menghadapi berbagai tantangan, di antaranya tingginya:

Pertama, rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia menjadi tantangan utama di tengah bonus demografi.

Upaya pemerintah untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih demokratis

¹⁷Ahmad Alfian, “Generasi Muda Bukan Sekadar Bonus Demografi tapi Pilar Ketahanan,” RMOL.id, 20 Mei 2025, <https://rmol.id/politik/read/2025/05/20/667062/generasi-muda-bukan-sekadar-bonus-demografi-tapi-pilar-ketahanan>. Diakses pada 19 Oktober 2025

¹⁸Ibid.,

melalui desentralisasi pengambilan keputusan belum sepenuhnya berhasil meningkatkan mutu pendidikan nasional. Meskipun desentralisasi diharapkan dapat memberdayakan aktor lokal dalam menentukan kebijakan yang relevan dengan kondisi daerah, kenyataannya hasil belajar siswa masih rendah. Berdasarkan data Programme for International Student Assessment (PISA), kemampuan membaca siswa Indonesia berada pada level 1a dengan skor 371, jauh di bawah rata-rata skor PISA sebesar 487. Dalam kemampuan matematika, siswa Indonesia menempati level 1 dengan skor 379, di bawah rata-rata skor 489, sedangkan dalam kemampuan sains berada pada level 1a dengan skor 396, juga di bawah rata-rata skor 489. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi pendidikan melalui demokratisasi belum efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan pemerataan akses pendidikan, terutama di daerah terpencil.¹⁹

Kedua, Difungsionalnya Kekuasaan dan Mandeknya Regenerasi Politik di Tengah Bonus Demografi

Fenomena difungsionalnya kekuasaan dan mandeknya regenerasi politik di Indonesia, terutama di tengah bonus demografi, menjadi isu krusial yang banyak dibahas dalam kajian akademik. Marlia et al. (2022) dalam studinya berjudul “Kepemimpinan, Pemerintahan, Bonus Demografi” menegaskan bahwa selama era bonus demografi, kekuasaan cenderung terpusat pada kelompok elit lama yang enggan membuka ruang bagi regenerasi politik. Sentralisasi kekuasaan ini mengakibatkan stagnasi dalam proses pergantian kepemimpinan serta membatasi kesempatan bagi munculnya pemimpin muda yang inovatif dan mampu memahami kebutuhan generasi baru serta dinamika politik yang terus berkembang.²⁰

Ketiga, angka pengangguran dan ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak di kawasan ASEAN, yaitu sekitar 261 juta jiwa, dengan jumlah angkatan kerja pada Agustus 2017 mencapai 128,06 juta orang, terdiri atas 121,02 juta orang yang bekerja dan 7,04 juta orang yang menganggur. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2016 tercatat sebesar 5,61%, sedangkan sekitar 69,02 juta orang atau 57,03% di antaranya bekerja di sektor informal.²¹ Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk usia produktif sangat besar, tantangan dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia masih menjadi persoalan serius. Ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial, frustrasi kolektif, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem politik yang ada. Jika kondisi ini tidak diatasi dengan kebijakan yang tepat, bonus demografi yang seharusnya menjadi peluang justru dapat berubah menjadi beban demografi yang mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan kualitas demokrasi di Indonesia.

Keempat, rendahnya literasi politik dan ketidakmerataan pemahaman demokrasi di kalangan generasi muda menjadi tantangan serius di tengah bonus demografi. Dominasi pemilih muda pada Pemilu 2024, yang terdiri atas 33,6% generasi

¹⁹Lalu Hamdian Affandi dan I Wayan Suastra, “Tantangan Demokratisasi Pendidikan Indonesia,” *Jurnal Basicedu* Vol. 8, No. 3 (2024): 1733–1742, Research & Learning in Elementary Education, hlm. 1734 <https://jbasic.org/index.php/basicedu>.

²⁰Cory Marlia, Susanto Ginting, dan M. Joharis Lubis, “Kepemimpinan Pemerintahan di Era Bonus Demografi,” *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 3, No. 1 (Juni 2022): 4319–4324.

²¹Dian Irma Aprianti, Suyanto, dan Sugeng Choirudin, “Tantangan Bonus Demografi bagi Pemerintah,” *Nusantara Innovation Journal* Vol. 1, No. 1 (2022): Fakultas Ekonomi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, hlm. 16.

milenial dan 22,85% generasi Z dari total daftar pemilih tetap (DPT) KPU RI, 2023, menunjukkan potensi besar dalam memperkuat demokrasi Indonesia. Namun, potensi ini tidak akan bermakna jika tidak diiringi dengan peningkatan kesadaran politik dan kemampuan berpikir kritis. Rendahnya literasi politik membuat sebagian anak muda mudah terpengaruh oleh disinformasi, propaganda digital, dan politik identitas yang berkembang di media sosial. Selain itu, ketidakpercayaan terhadap sistem politik formal sering kali menumbuhkan sikap apatis atau golput, yang justru melemahkan kualitas partisipasi politik.²²

Secara keseluruhan, bonus demografi bukanlah jaminan otomatis bagi kemajuan demokrasi, melainkan peluang yang harus dikelola secara strategis. Tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan lembaga politik, dan kesadaran kritis generasi muda, bonus demografi justru berisiko menimbulkan ketimpangan sosial dan melemahkan demokrasi. Keberhasilan Indonesia menghadapi era ini bergantung pada keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pendidikan politik, dan penegakan etika publik yang demokratis.

Selain itu, masih banyak tantangan lain yang memengaruhi kualitas demokrasi, seperti ketimpangan digital, lemahnya budaya hukum, serta rendahnya partisipasi perempuan dalam politik. Karena itu, diperlukan kebijakan publik yang inklusif, tata kelola pemerintahan partisipatif, dan pendidikan politik berkelanjutan agar potensi bonus demografi benar-benar menjadi kekuatan bagi kemajuan demokrasi Indonesia.

Peluang bonus demografi terhadap demokrasi

Bonus demografi membuka peluang strategis yang sangat besar bagi penguatan demokrasi Indonesia agar menjadi lebih substantif dan inklusif. Sebagai modal utama pembangunan, proporsi besar pemuda usia produktif dapat mendorong percepatan kemajuan sosial, budaya, dan teknologi yang berdampak langsung pada kualitas demokrasi. *Macan Asia yang tertidur* adalah julukan lama yang kerap disematkan kepada Indonesia. Julukan ini lahir karena negeri ini memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi dunia, terutama di kawasan Asia. Letak geografis yang strategis membuat Indonesia kaya akan sumber daya alam (SDA), mulai dari tambang, maritim, hingga pertanian. Namun, potensi ini hanyalah modal awal. SDA yang melimpah tidak akan memberikan hasil maksimal tanpa sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Kondisi ini membuka peluang besar untuk mewujudkan cita-cita “Indonesia Emas 2045” tahun ketika Indonesia ditargetkan masuk lima besar kekuatan ekonomi dunia. Kombinasi SDA yang melimpah dan SDM yang unggul, apabila dikelola dengan baik, dapat menjadi kunci keberhasilan. Kunci utama keberhasilan terletak pada pendidikan. Perbaikan infrastruktur, kurikulum berorientasi jangka panjang, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta pemerataan akses pendidikan menjadi prioritas. Dengan pendidikan bermutu, masyarakat akan sadar akan potensinya dan mampu menjadi penggerak ekonomi nasional.²³

Menurut Paolo Freire Pendidikan merupakan instrumen fundamental yang membebaskan manusia dari kegelapan dan mengarahkan manusia pada terang benderang

²²Syakira Syafiqya Tsabita, *Pemilih Muda sebagai Penentu Arah Politik: Analisis Partisipasi Politik, Preferensi Elektoral, dan Pengaruh Media Sosial terhadap Generasi Z*, KPU Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, hlm. 1-14

²³Penulis Indonesiana, "Bonus Demografi Indonesia: Peluang atau Jurang?," Indonesiana, 4 September 2025, <https://www.indonesiana.id/read/186054/bonus-demografi-indonesia-peluang-atau-jurang>. Diakses pada 20 Oktober 2025.

hidupnya (post nubila, phaebus).²⁴ Selain itu, Indonesia memiliki modal penting berupa sistem pemerintahan demokratis dan ideologi Pancasila. Keduanya menjadi fondasi masyarakat untuk bebas berpikir, berinovasi, dan bereksresi, tanpa meninggalkan nilai moral dan budaya lokal. Pendidikan yang fleksibel, berbasis nilai agama dan budaya, serta terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan akan menjadi bekal menghadapi tantangan global.²⁵

Seperti yang pernah diceritakan oleh Georg Aditjondro lewat anekdot dua ekor katak, gambaran ini sangat relevan dengan situasi generasi muda Indonesia yang sedang menghadapi tantangan bonus demografi. Katak pertama dimasukkan ke dalam kuali berisi air panas mendidih, ia segera melompat keluar karena langsung merasakan panasnya air. Katak kedua dimasukkan ke dalam kuali berisi air dingin dan mulai berenang dengan santai, tetapi ketika kuali itu dipanaskan secara perlahan-lahan, katak tersebut tidak menyadari perubahan suhu yang meningkat hingga akhirnya ia mati direbus dalam kuali tersebut.²⁶ Anekdot ini menjadi peringatan bahwa ketidak sadaran dan kelalaian terhadap perubahan yang perlahan tapi pasti dapat mengakibatkan akibat yang fatal. Menghadapi dinamika masa depan diperlukan revolusi mental sebagai totalitas perubahan bangsa. Revolusi mental menuntut perubahan pola pikir dan perilaku dari negatif ke positif: dari malas menjadi rajin, dari melanggar hukum menjadi taat, dari korupsi menjadi antikorupsi, dari konflik menuju harmoni, dan dari masa lalu ke orientasi masa depan. Sejalan dengan pernyataan Henry Ford, “If you always do what you’ve always done, you’ll always get what you’ve always got,” perubahan nyata adalah kunci untuk meraih kemajuan dan keluar dari kemerosotan bangsa.²⁷

Pendidik harus mencermati tiga kondisi penting dalam pendidikan karakter saat ini. Pertama, era globalisasi membawa dampak positif sekaligus negatif yang mesti diwaspadai agar Indonesia tidak menjadi tempat limbahnya. Kedua, kurikulum masih terlalu menekankan aspek kognitif dan intelektual saja. Ketiga, kemunculan generasi net dan alpha menuntut strategi baru dalam penanaman karakter. Presiden Soekarno menegaskan bahwa investasi mental adalah fondasi kemajuan bangsa, sebab keterampilan dan materi tanpa pembangunan mental yang kuat tidak cukup untuk persatuan dan kesejahteraan. Pendidikan karakter harus menjadi kajian akademis yang mendalam, mengintegrasikan penalaran, perasaan, dan tindakan moral sebagai indikasi kematangan karakter.²⁸ Dalam konteks ini, bonus demografi merupakan momentum penting untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah telah meluncurkan program peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan lapangan kerja, dan pengembangan infrastruktur teknologi, yang menyertakan pendidikan karakter dan literasi digital agar generasi muda tumbuh menjadi pribadi produktif, berintegritas, serta bertanggung jawab sosial.

Urgensitas pendidikan politik ditengah peluang bonus demografi

Menurut karataprawira pendidikan politik merupakan upaya untuk meningkatkan partisipasi rakyat secara maksimal dalam sistem politik sesuai dengan paham kedelautan.²⁹ Aristoteles dalam pandangan klasik melihat politik sebagai suatu asosiasi warga negara

²⁴Marianus Mantovanny Tapung, *Dialektika Filsafat dan pendidikan penguatan filosofis atas konsep dan praktis pendidikan*, (Parrhesia institute Jakarta, 2013), hlm. 219

²⁵Ibid.,

²⁶Otto Gusti Madung, *Post-Sekularisme, Toleransi dan Demokrasi*, (Maumere: Penerbit Ledalero, 2017), hlm.137

²⁷Dr. Zubaedi, *Strategi Taktis Pendidikan Karakter (Untuk PAUD dan Sekolah)* (Jakarta: Rajawali Pers, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada, 2017), vi.

²⁸Ibid., hlm. X

²⁹Ilham Kurniawan, S.IP, *pentingnya pendidikan politik*, UMJ. UniverMuhammadiyah Jakarta. 2024. hlm. 40

yang berfungsi untuk membicarakan dan menyelenggarakan hal-hal yang menyangkut kebaikan bersama.³⁰ Pendidikan politik sangat urgensi untuk ditingkatkan dalam kehidupan masyarakat, secara khusus di tengah gemparnya fenomena bonus demografi. Pendidikan politik menjadi kekuatan fundamental dalam menata demokrasi ditengah peluang bonus demografi. Penguatan pendidikan politik memegang peranan penting dalam mempersiapkan generasi muda sebagai aktor utama dalam bonus demografi Indonesia. Dengan proporsi usia produktif yang besar, pendidikan politik berfungsi strategis yaitu:

1. Mengubah dan membentuk perilaku

Dalam konteks bonus demografi, pendidikan politik dirancang untuk mengubah dan membentuk perilaku individu sesuai dengan tujuan politik yang sehat dan konstruktif. Hal ini sangat penting agar generasi muda yang jumlahnya besar tidak hanya menjadi objek politik, tetapi juga subjek aktif yang mampu berkontribusi positif dalam proses demokrasi dan pembangunan nasional.

2. Pemahaman dan Penghayatan Nilai-nilai Politik

Pendidikan politik turut meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya pemuda, tentang nilai, norma, dan simbol politik yang ideal dan demokratis. Dalam menghadapi dinamika sosial-politik akibat perubahan demografi, penghayatan nilai-nilai ini menjadi modal penting untuk menjaga kohesi sosial, mencegah konflik, dan memupuk budaya politik yang sehat. Partisipasi Politik yang

3. Bertanggung Jawab

Salah satu fokus utama pendidikan politik dalam kerangka bonus demografi adalah membentuk partisipasi politik generasi muda yang bertanggung jawab dan berintegritas. Pendidikan ini membekali mereka agar mampu menyalurkan aspirasi secara damai, kritis, dan konstruktif, sekaligus melindungi mereka dari politik identitas, politik uang, dan penyebaran informasi yang menyesatkan.³¹

Politik Digital sebagai Strategi Pengelolaan Bonus Demografi

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sistem politik dan praktik demokrasi. Di era digital saat ini, muncul sebuah konsep baru yang dikenal sebagai demokrasi digital, yaitu bentuk partisipasi politik yang memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana utama dalam proses demokrasi. Demokrasi digital mencakup penggunaan berbagai platform teknologi seperti media sosial, portal berita daring, dan forum diskusi virtual yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih aktif, terbuka, dan interaktif dalam kehidupan politik.³² Selain itu, pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi menjadi salah satu strategi efektif dalam meningkatkan literasi politik di kalangan generasi muda.³³ Dalam seminar nasional “Menyelamatkan Demokrasi: Tanggapan terhadap Kekisruan Sejarah” yang diselenggarakan di IFTK Ledalero pada 18 Oktober 2025, Dr. Yanuar Nugroho menegaskan bahwa partisipasi generasi muda dalam demokrasi kerap diwujudkan melalui media sosial. Media ini menjadi ruang penting untuk berdiskusi dan mengkritik

³⁰Bedjo Sukarno, *Pendidikan Politik dalam Demokratisasi*, FISIP Unisri, hlm. 4

³¹Ibid., hlm. 21

³²M. Akmal, “*The Roles of Digital Democracy on Political Education for Young Generation*,” dalam Emerald Reach Proceedings Series, vol. 1 (Bingley: Emerald Group Holdings Ltd., 2018), hlm. 43–48, <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-793-1-00071>.

³³S. I. Astuti, “Enhancing Active Citizenship and Political Literacy among Young Voters in High School,” dalam Proceedings of the Social and Humaniora Research Symposium (SoRes 2018) (2019), <https://doi.org/10.2991/sores-18.2019.72>.

pemerintah secara kritis saat demokrasi berjalan tidak sesuai jalurnya.³⁴ Media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan YouTube menjadi platform utama generasi ini untuk memperoleh informasi politik, membangun opini, serta mengekspresikan aspirasi politik mereka secara terang-terangan dan interaktif.³⁵

Untuk mengoptimalkan potensi bonus demografi melalui politik digital, perlu dipersiapkan berbagai aspek berikut: Menguatkan kecerdasan dan keadaban dalam menggunakan teknologi digital. Pemerintah dan pemangku kepentingan harus berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan literasi digital, mulai dari penguasaan teknologi dasar hingga keahlian lanjut seperti coding, manajemen media sosial, dan analisa data. Program ini harus menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama generasi muda dan wilayah pelosok.

- Mengencarkan pendidikan dan literasi politik digital agar masyarakat memahami bagaimana teknologi dapat dipakai sebagai alat partisipasi politik yang positif. Termasuk pemahaman tentang Undang-Undang ITE, bahaya hoaks, kampanye digital yang etis, sistem e-governance yang aman, serta ruang partisipasi kritik dan masukan publik dalam perumusan kebijakan.
- Mencegah misinformasi dan disinformasi yang jika dibiarkan dapat mengganggu stabilitas sosial dan keamanan nasional.
- Meningkatkan pemahaman pemilih muda dan calon pemilih mengenai sejarah dan sistem pemilu, hak serta kewajiban memilih, isu politik lokal dan nasional, cara menghadapi konten negatif di media digital, serta menumbuhkan nilai-nilai demokrasi dan partisipasi aktif. Metode pendidikan ini dapat disampaikan lewat platform digital agar efektif dan luas jangkauannya.
- Memperhatikan kesetaraan akses digital dengan memperluas infrastruktur dan koneksi vitas secara merata dalam rangka memastikan semua lapisan masyarakat dapat terlibat dalam ekosistem digital politik.
- Mengoptimalkan analisa data digital dalam memahami tren sosial dan politik sebagai dasar pengambilan kebijakan dan strategi kampanye politik yang lebih tepat sasaran. Analisa ini sangat penting bagi lembaga politik seperti pemerintah, KPU, Bawaslu, partai politik, agar program dan kebijakan selaras dengan aspirasi masyarakat.
- Mempersiapkan solusi terhadap berbagai dampak negatif perkembangan teknologi digital, seperti kejahatan siber, pencurian data, penipuan, penyebaran paham yang merusak, dan konflik sosial melalui upaya pengamanan sistem serta kemudahan akses penggunaan teknologi.

Keseluruhan upaya ini harus diawali dengan revolusi cara pandang dan pola pikir politik yang lebih modern, bertanggung jawab, dan berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Pemahaman mendalam tentang dinamika politik digital harus menjadi perhatian semua pemangku kepentingan, termasuk warga negara, partai politik, dan pemerintah. Dengan memanfaatkan potensi positif politik digital sekaligus mengatasi tantangan yang muncul, Indonesia dapat memastikan demokrasi yang sehat, berkelanjutan, dan budaya politik yang semakin kuat.³⁶

³⁴ Dr. Yanuar Nugroho, “Menyelamatkan Demokrasi: Tanggapan terhadap Kekisruan Sejarah”, Seminar Nasional, IFTK Ledalero, 18 Oktober 2025.

³⁵ Natalia, D., Sasmita, F., & Ahmad, M.R.S. (2025). “Partisipasi Politik Generasi Z: Peran Media Sosial.” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), hlm. 5773 <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/28067/18924/47454>.

³⁶ *Ibid.*,

KESIMPULAN

Fenomena bonus demografi yang tengah dihadapi Indonesia merupakan momentum strategis yang sangat berpotensi memperkuat kehidupan demokrasi bangsa. Proporsi penduduk usia produktif yang mendominasi membuat generasi muda menjadi aktor utama dalam proses demokrasi yang lebih substantif, inklusif, dan berkeadilan. Namun, realitas di lapangan memperlihatkan berbagai tantangan serius, seperti rendahnya literasi politik generasi muda, apatisme politik, serta ketimpangan akses pendidikan dan pemanfaatan teknologi digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa bonus demografi bukanlah jaminan otomatis bagi kemajuan demokrasi, tetapi harus dikelola dengan kebijakan yang tepat dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Rekonstruksi demokrasi di tengah bonus demografi mesti menempatkan pendidikan politik sebagai instrumen utama untuk membentuk kesadaran demokrasi, moralitas, dan tanggung jawab sosial generasi muda. Pendidikan politik yang kritis dan karakter kebangsaan yang kuat menjadi fondasi untuk meminimalisasi risiko fragmentasi sosial akibat disinformasi, politik identitas, dan apatisme. Selain itu, pemanfaatan media digital secara etis dan literasi digital yang tinggi menjadi prasyarat agar generasi muda dapat berperan aktif dan berdaya dalam ekosistem demokrasi modern.

Dukungan kebijakan inklusif yang mengintegrasikan pendidikan karakter, kesehatan, dan kesempatan ekonomi adalah kunci untuk mengoptimalkan potensi demografis ini. Jika dikelola dengan baik, bonus demografi dapat menjadi modal sosial dan politik yang memperkuat ketahanan demokrasi serta keberhasilan pembangunan nasional. Oleh karena itu, upaya sinergis antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk membentuk generasi muda yang produktif, berintegritas, dan memiliki komitmen tinggi terhadap nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial sebagai landasan masa depan bangsa. Kesimpulan ini menegaskan bahwa pemanfaatan bonus demografi sebagai kekuatan transformasi demokrasi harus dilandasi oleh pendidikan politik yang efektif dan kesiapan moral generasi muda, sehingga demokrasi Indonesia dapat tumbuh tidak hanya sebagai sistem prosedural tetapi sebagai budaya politik yang hidup dan bermakna.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Baghi, Felix, ed. *Kewarganegaraan Demokratis: Dalam Sorotan Filsafat Politik*. Maumere: Ledalero, 2009.
- Kurniawan, Ilham. *Pentingnya Pendidikan Politik*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2024.
- Madung, Otto Gusti. *Post-Sekularisme, Toleransi dan Demokrasi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2017.
- Mantovanny Tapung, Marianus. *Dialektika Filsafat dan Pendidikan: Penguantan Filosofis atas Konsep dan Praktik Pendidikan*. Jakarta: Parrhesia Institute, 2013.
- Masdari Umaridin. *Membaca Pikiran Gusdur dan Amin Rais tentang Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999.
- Sukarno, Bedjo. *Pendidikan Politik dalam Demokratisasi*. Surakarta: FISIP Unisri, t.t.
- Sunny Umul Firdaus, Sunny, dkk. *Kajian Penguantan Sistem Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, t.t.
- Syafiqya Tsabita, Syakira. *Pemilih Muda sebagai Penentu Arah Politik: Analisis Partisipasi Politik, Preferensi Elektoral, dan Pengaruh Media Sosial terhadap Generasi Z*. Garut: KPU Kabupaten Garut, t.t.
- Zubaedi. *Strategi Taktis Pendidikan Karakter (Untuk PAUD dan Sekolah)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Jurnal Ilmiah

- Affandi, Lalu Hamdian, dan I Wayan Suastra. "Tantangan Demokratisasi Pendidikan Indonesia." *Jurnal Basicedu* 8, no. 3 (2024): 1733–1742.
- Afionita, Santika, dan Sinta Nur Rahayu. "Demokrasi Digital dan Pendidikan Politik Generasi Muda di Indonesia." *Jurnal Kajian Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2025): 143–152.
- Akmal, M. "The Roles of Digital Democracy on Political Education for Young Generation." *Emerald Reach Proceedings Series* 1 (2018): 43–48.
- Aprianti, Dian Irma, Suyanto, dan Sugeng Choirudin. "Tantangan Bonus Demografi bagi Pemerintah." *Nusantara Innovation Journal* 1, no. 1 (2022): 10–18.
- Astuti, S. I. "Enhancing Active Citizenship and Political Literacy among Young Voters in High School." *Proceedings of the Social and Humaniora Research Symposium (SoRes 2018)* (2019).
- Aulia, Siti Kholiza, et al. "Tinjauan Peran Pendidikan Politik Dalam Kehidupan Demokrasi Generasi Z." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 2 (2024): 1464.
- Cory Marlia, Susanto Ginting, dan M. Joharis Lubis. "Kepemimpinan Pemerintahan di Era Bonus Demografi." *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, no. 1 (2022): 4319–4324.
- Handoko, L. T. "Maksimalkan Bonus Demografi Melalui Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi." BRIN, 2022.
- Hutagalung, Simon Sumanjoyo, et al. "Menuju Indonesia Emas 2045: Peran Generasi Muda Bidang Sosial, Teknologi, dan Ekonomi." *JPM Terekam Jejak* 1, no. 1 (2024): 7.
- Natalia, D., Sasmita, F., & Ahmad, M. R. S. "Partisipasi Politik Generasi Z: Peran Media Sosial." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 5773.
- Sutikno, Achmad Nur. "Bonus Demografi di Indonesia." *VISIONER* 12, no. 2 (2020): 426.
- Tsabita, Syakira Syafiqya. Pemilih Muda sebagai Penentu Arah Politik: Analisis Partisipasi Politik, Preferensi Elektoral, dan Pengaruh Media Sosial terhadap Generasi Z. KPU Kabupaten Garut.
- Ulfah, N., Y. Hidayah, dan M. Trihastuti. "Urgensi Etika Demokrasi di Era Global." *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 345.

Laporan Resmi, Media, dan Sumber Online

- Alfian, Ahmad. "Generasi Muda Bukan Sekadar Bonus Demografi tapi Pilar Ketahanan." RMOL.id, 20 Mei 2025. <https://rmol.id/politik/read/2025/05/20/667062/generasi-muda-bukan-sekadar-bonus-demografi-tapi-pilar-ketahanan>. Diakses 19 Oktober 2025.
- Badan Pusat Statistik. *Analisis Profil Penduduk Indonesia*. Jakarta: BPS, 2022. <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/06/24/ea52>. Diakses 18 Oktober 2025.
- Indonesiana, Penulis. "Bonus Demografi Indonesia: Peluang atau Jurang?" Indonesiana, 4 September 2025. <https://www.indonesiana.id/read/186054/bonus-demografi-indonesia-peluang-atau-jurang>. Diakses 20 Oktober 2025.
- Nugroho, Yanuar. "Menyelamatkan Demokrasi: Tanggapan terhadap Kekisruan Sejarah." Seminar Nasional, IFTK Ledalero, 18 Oktober 2025.